

ABSTRAK

IMAM AL HAMDI 105 251 1090 20 PERAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KANTOR POLDA SULAWESI SELATAN). Dipandu oleh Muhammad Ruidwan dan hasanuddin

Tugas utama kepolisian mencakup tiga hal utama, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat. Dalam kaitannya dengan sengketa ekonomi syariah, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). Kepolisian bertanggung jawab dalam mengidentifikasi serta menyelidiki indikasi pelanggaran atau kejahatan di sektor sengketa ekonomi syariah guna memastikan bahwa setiap tindak pidana yang merugikan masyarakat dapat segera dihentikan dan pelakunya diproses hukum. Kewenangan ini menjadikan peran kepolisian sangat krusial dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran, terutama di sektor yang sensitif seperti sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, tujuan penelitian yang penulis ambil adalah untuk mengetahui bagaimana peran lembaga kepolisian dalam penanganan sengketa ekonomi syariah pada polda sulawesi selatan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dimana penulis akan mewawancarai penyidik dalam kasus sengketa ekonomi syariah untuk mengetahui peran lembaga kepolisian khususnya polda sulawesi selatan dalam penanganan kasus sengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan penyidik, dapat di simpulkan bahwa Lembaga kepolisian bertugas menerima aduan dari pihak yang dirugikan, melakukan penyelidikan, melakukan mediasi, pengamanan: proses penyelesaian sengketa dan mencegah terjadinya kekerasan serta berkoordinasi dengan lembaga lain. Lembaga kepolisian juga bertugas untuk mengawasi proses hukum, memberikan bantuan kepada kejaksaan dan pengadilan dalam proses penyelesaian perkara, mengamankan saksi dan barang bukti, memantau pelaksanaan putusan pengadilan dan memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan dengan baik.

Kata kunci : lembaga kepolisian, sengketa ekonomi syariah.

ABSTRACT

IMAM AL HAMDI 105 251 1090 20 *THE ROLE OF THE POLICE INSTITUTION IN HANDLING CASES OF SHARIA ECONOMIC DISPUTES (CASE STUDY OF SOUTH SULAWESI REGIONAL POLICE OFFICE)*. Guided by Muhammad Ruidwan and Hasanuddin

The main duties of the police include three main things, namely maintaining public security and order, enforcing the law, and providing protection, care, and services to the community. In relation to sharia economic disputes, the police have the authority to take various legal actions, both preventive (prevention) and repressive (action). The police are responsible for identifying and investigating indications of violations or crimes in the sharia economic dispute sector to ensure that any criminal acts that harm the community can be stopped immediately and the perpetrators are prosecuted. This authority makes the role of the police very crucial in detecting and prosecuting violations, especially in sensitive sectors such as sharia economic disputes. Based on the description of the background of the problem, the purpose of the research that the author took was to find out how the role of the police institution in handling sharia economic disputes at the South Sulawesi Regional Police

The research method used is a qualitative method where the author will interview investigators in sharia economic dispute cases to find out the role of the police institution, especially the South Sulawesi Regional Police in handling sharia economic dispute cases.

Based on the results of interviews with investigators, it can be concluded that the police institution is tasked with receiving complaints from the injured party, conducting investigations, conducting mediation, securing the dispute resolution process and preventing violence and coordinating with other institutions. The police institution is also tasked with supervising the legal process, providing assistance to the prosecutor's office and the court in the case resolution process, securing witnesses and evidence, monitoring the implementation of court decisions and ensuring that the decisions are implemented properly.

Keywords: police institution, sharia economic disputes.